

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Pemberdayaan Masyarakat**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pemberdayaan**

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya: yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan ataupun kemampuan, dan juga proses pemberian daya atau kekuatan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Sulistiyani 2003, hlm. 77).

Menurut Mas’oed (1990), pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) dan kekuatan (*strengthening*) kepada masyarakat. *Empowerment* secara singkat diartikan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada masyarakat untuk berani bersuara (*voice*), mampu dan berani memilih (*choice*) untuk kehidupan mereka yang lebih baik. Menurut Sudodiningrat (1997), pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberadaan masyarakat yang bersangkutan dimana masyarakat dengan keberadaannya tinggi, masyarakat yang sehat secara fisik dan mental, terdidik dan kuat dan memiliki nilai-nilai intrinsik dan keberagaman dan kebinekaan. Karena itu pemberdayaan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/*upgrade* dari obyek yang diberdayakan.

Menurut Prijono dan Pranarka (1996, hlm. 77), menyatakan bahwa : “Pemberdayaan mengandung dua arti pengertian yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to our enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang

kurang atau belum berdaya. Disisi lain pemaknaan pengertian yang kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta meberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu”.

Pemberdayaan memiliki konsep dasar yang dapat mengubah masyarakat dari miskin menjadi manusia yang mampu. Masyarakat harus didorong untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Peran pemerintah sebagai fasilitator hanya mendorong terbangunnya kesadaran masyarakat, pembentukan sistem, penyusunan pedoman, dan pelatihan pekerja masyarakat dalam proses yang andal di bidangnya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan mereka dan kehidupan orang lain yang penting bagi mereka.

Istilah pemberdayaan masyarakat atau empowerment yaitu suatu istilah yang diangkat dari hasil riset seorang sarjana pendidikan nonformal Suzanne Kindervatter dalam bukunya *NonFormal as An Empowering Process*, yang bermakna bahwa setiap individu memiliki daya dan mempunyai hak untuk hidup secara layak sama halnya dengan orang lain di luaran sana yang sudah hidup layak. Adapun yang melihat dari segi pendidikan bahwa upaya untuk mencerdaskan bangsa atau memberdayakan masyarakat dilihat dari pikiran, perkataan dan perbuatan sebagai warga negara, juga menjaga demokrasi dengan orang lain untuk memahami hak, wewenang, dan tanggung jawab negara dan semua aspek kehidupan berbangsa (Hiryanto 2008, hlm. 2).

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya untuk membantu masyarakat mengembangkan kemampuannya sendiri sehingga dapat secara bebas memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menumbuh kembangkan kekuatan dan kemampuan kelembagaan masyarakat agar mampu mengelola dan mengatasi tantangan permasalahan masa depan secara mandiri (Sunartiningsih 2004, hlm. 50).

Secara harfiah, Soetomo (2011, hlm. 21) menjelaskan bahwa pemberdayaan bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan” kepada masyarakat yang lemah. Istilah pemberdayaan yang semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Namun, hal yang penting dalam proses pemberdayaan yaitu peningkatan kesadaran. Masyarakat yang sadar adalah masyarakat yang memahami hal-hal dan tanggung jawab secara politik, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan sekelompok masyarakat guna meningkatkan harkat dan martabat masyarakat agar memiliki keberdayaan dalam menghadapi segala persoalan yang ada (Aritonang 2001, hlm. 1).

Menurut Shardlow (1998) yang dikutip Sabirin, konsep pemberdayaan pada dasarnya membahas tentang bagaimana individu dan kelompok berusaha untuk memperbaiki kehidupannya dan mendapatkan bantuan dari lingkungan sekitar demi membentuk masa depan yang lebih baik sesuai dengan yang diinginkan.

Berdasarkan pengertian diatas, pemberdayaan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan demi memperkuat keberdayaan individu atau kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat, contohnya yaitu masyarakat yang mengalami kemiskinan, seperti mereka yang hidup kurang berdaya atau belum mencukupi, agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam berbagai aspek. Terdapat beberapa cara untuk mencapai proses pemberdayaan yaitu, dengan memberikan dukungan kepada masyarakat berupa sumberdaya, peluang, pengetahuan dan keterampilan. Agar setiap individu bisa lebih mengasah kemampuannya, memupuk kesadaran akan potensinya, atau menambah keterampilan lainnya.

#### 2.1.1.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan dasar dari pemberdayaan yaitu keadilan sosial yang dilakukan secara sama rata dengan cara memberikan kenyamanan, ketentraman, persamaan politik sosial dengan melalui pengembangan langkah-langkah

kecil ini agar dapat tercapai tujuan yang lebih besar (Payne 1997 dalam Abu Huraerah) 2011, hlm. 99). Maka dari itu pemberdayaan memiliki tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek pemberdayaan harus jelas atau spesifik, terukur (*measurable*) dan sederhana (*realistic*), sehingga akan lebih memotivasi masyarakat untuk mewujudkannya dalam waktu tertentu. Tujuan pemberdayaan yang lebih baik harus adanya penetapan tujuan jangka panjang (*vision*) agar dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal.

Penting untuk memahami tujuan dari proses pemberdayaan, karena tujuan yang disepakati bersama akan menjadi inovasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan. Untuk memahami fokus dan tujuan pemberdayaan dalam operasionalnya, perlu dipahami apa yang menjadi tujuan dari keberdayaan agar bisa menunjukkan bahwa masyarakat berdaya atau tidaknya. Dari perspektif kesejahteraan dan kemampuan sosial, budaya, dan politik, keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada pemberdayaan ekonomi yang terkait dengan kemampuan.

Secara umum, tujuan dari desain pemberdayaan masyarakat adalah:

- a. Masyarakat mungkin tahu bahwa kemiskinan itu disebabkan oleh nasib, tetapi ada beberapa hal yang selama ini membuat mereka tidak berdaya.
- b. Masyarakat memiliki keterampilan untuk membuat dan mengelola lembaga dan jaringan berdasarkan minat, kebutuhan, serta kemandirian.
- c. Masyarakat memiliki rasa sadar, termotivasi dan mau berkontribusi pada proses aktual maupun mengembangkan hasil pembangunan.
- d. Masyarakat berhak memilih calon atau memiliki hak untuk memilih calon yang menjadi utusan untuk jejaring forum dan merundingkan pengembangan kebijakan mengenai pembangunan di tingkat lokal yang lebih berkeadilan dari segi kesejahteraan warga yang belum berdaya.

Dengan demikian tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu agar masyarakat dari yang semula tidak berdaya, dan dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dalam berbagai segi (aspek). Tujuan pemberdayaan juga dapat bervariasi tergantung pada pengembangan atau bidang pemberdayaan yang akan digeluti atau dicapai. Dimana dapat memandirikan masyarakat dari kesenjangan, keterbelakangan, diskriminasi dan ketidakberdayaan. Hal tersebut dapat terlihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yaitu mencakup pakian, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan transportasi yang layak. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumber daya manusia yang lemah dan lain sebagainya. Kemudian ketidakberdayaan adalah melemahnya nilai sosial yang ada di masyarakat.

#### 2.1.1.3 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan memiliki prinsip dalam semua proses. Sesuai dengan prinsip pemberdayaan dalam Totok dan Poerwoko (2012, hlm. 105), Matthews mencatat bahwa : “Prinsip adalah suatu pernyataan tentang Kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten”. Oleh karena itu, prinsip tersebut akan diterima secara umum, dan dapat diterima secara universal, serta dianggap benar dari berbagai pengamatan dalam berbagai kondisi. Meskipun prinsip-prinsip ini pada umumnya berlaku dunia akademisi, tetapi setiap fasilitator harus menghormati prinsip tersebut.

Penulis mencatat bahwa menurut Sri Najati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra ada empat prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Prinsip Kesetaraan. Prinsip ini merupakan prinsip awal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat yaitu adanya kesetaraan antara masyarakat dan lembaga agar dapat melaksanakan program pemberdayaan masyarakat tanpa membedakan gender. Dalam dinamika kemapanan, kesetaraan dicapai melalui pengembangan pengetahuan, pengalaman dan keahlian antara satu sama

lain. Agar setiap individu bisa saling mengakui kekuatan dan kelemahan yang menjadikan proses untuk belajar bersama.

2. Partisipasi. Program partisipatif dapat direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk butuh waktu dan proses yang terarah untuk mencapai pada level terbaik, yang melibatkan pendamping atau orang yang memiliki komitmen pada pemberdayaan masyarakat.
3. Kemandirian. Prinsip ini menghormati dan mengutamakan kemampuan masyarakat, bukan berdasarkan bantuan sisi lain. Konsep ini tidak menganggap manusia sebelah mata sebagai objek yang tidak kompeten, tetapi sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit. Setiap masyarakat memiliki kemampuan untuk mengumpulkan segala macam wawasan, seperti hambatan usaha, pemahaman kondisi lingkungan, memiliki tenaga kerja dan kemauan dan kepatuhan yang baik terhadap norma-norma sosial. Maka dari itu masyarakat harus belajar mandiri sejak awal agar kedepannya lebih bisa maju.
4. Berkelanjutan. Rencana otorisasi harus dirancang untuk jangka yang berkelanjutan, jika pada awalnya itu hanya sebagai mitra, tetapi lebih dominan dari pada komunitas itu sendiri. Namun lambat laun, karena masyarakat dapat mengelola kegiatannya sendiri, peran fasilitator lambat laun akan melemah dan akhirnya tersingkir dan masyarakatpun mengelolanya dengan baik.

Selain prinsip tersebut, terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif, karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerja sama sebagai partner. Adapun prinsip tersebut adalah:

1. Proses pekerjaan sosial menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subyek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
2. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.

3. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan persaan mampu pada masyarakat.
4. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi kasus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
5. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
6. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
7. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
8. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
9. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif dan permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
10. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel (Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, 1999).

#### 2.1.1.4 Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan sebagai sebuah proses tentunya dilaksanakan secara bertahap dan tidak bisa langsung dilaksanakan. Menurut tahapan pemberdayaan Ambar Teguh Sulistyani yang dikutip Aziz Muslim dalam buku berjudul “Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat”, tahapan yang harus dilalui dalam pemberdayaan antara lain:

Pertama, tahap pembentukan kesadaran dan perilaku. Perlu disadari adanya perilaku yang sadar dan mendukung sehingga mereka merasa perlu untuk meningkatkan kemampuannya. Pada tahap ini, semua pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan harus menyadari bahwa mereka perlu

berubah untuk mengubah keadaan menjadi sejahtera. Sedikit kesadaran akan membuka keinginan dan kesadaran akan situasi saat ini, sehingga mereka akan mampu mewujudkan dan memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, kesadaran ini dapat memotivasi mereka yang menjadi sasaran pemberdayaan untuk mengubah perilakunya.

Kedua, tahap transformasi pengetahuan dan keterampilan. Dalam hal ini, perlu dipahami berbagai pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan. Dengan pengetahuan dan keterampilan, objek yang berwenang akan memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan tersebut akan menjadi nilai tambah potensinya di masa depan. Oleh karena itu, pemberdayaan lebih lanjut dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Ketiga, tahap peningkatan kapasitas intelektual dan keterampilan. Dalam fase ini, tujuan pemberdayaan adalah untuk lebih mengembangkan keterampilan yang dimiliki dan meningkatkan keterampilan dan kemampuan yang mengarah pada kemandirian.

Menurut Hempri dan Suparjan (2003, hlm. 44), dalam rangka pemberdayaan masyarakat, beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya :

- 1) Meningkatkan kesadaran kritis atau status masyarakat dalam struktur sosial politik;
- 2) Munculnya kesadaran darurat berharap bisa memungkinkan masyarakat untuk menentang segala jenis eksploitasi dan sekaligus mengambil suatu keputusan;
- 3) Memperkuat daya muat masyarakat;
- 4) Pemberdayaan juga harus dikaitkan dengan pengembangan sosial dan budaya masyarakat.

Adapun upaya untuk pemberdayaan masyarakat meliputi tiga tahap, yaitu:

- a. Menciptakan suasana dimana masyarakat itu sendiri dapat dikembangkan. Titik awalnya ialah menyadari yakni setiap orang memiliki potensi atau kekuatan yang dapat ditingkatkan secara lebih lagi.
- b. Dalam hal ini diperlukan penguatan potensi dan kekuatan masyarakat, mengambil langkah-langkah positif dan praktis, serta membuka segala macam peluang agar masyarakat lebih berdaya dan bisa memanfaatkan peluang.

#### 2.1.1.5 Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Parson 1994 (dalam Suharto 2010, hlm. 63), ia mengusulkan tiga dimensi pemberdayaan, mengacu pada: a) proses pembangunan dimulai dengan pertumbuhan pribadi dan kemudian jadi suatu perubahan sosial yang sangat besar, b) keadaan mental yang dilihat dari kepercayaan diri, dapat berguna juga bisa mengendalikan diri sendiri dan orang lain, c) emansipasi yang dihasilkan oleh gerakan sosial diawali dengan pendidikan dan politisasi kaum lemah, dan kemudian melibatkan mereka yang lemah atau dibawah agar bisa mendapatkan dukungan juga kekuasaan.

Untuk memahami fokus dan tujuan otorisasi pemberdayaan dalam pengoprasiaannya, perlu dipahami beberapa indikator otorisasi keberdayaan yang bisa melihat apakah seseorang itu berdaya atau tidak. Oleh karena itu, saat rencana program sudah ada, semua upaya dapat difokuskan pada aspek apapun dari tujuan perubahan.

Indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat antara lain:

1. Mengurangi penduduk dalam kemiskinan.
2. Upaya pemanfaatan kapasitas yang ada dalam mengubah pendapatan masyarakat miskin.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang peningkatan kesejahteraan kesejahteraan lingkungan keluarga kurang mampu.
4. Kemandirian masyarakat ditingkatkan, yang dilihat dari perkembangan anggota dan upaya kelompok, permodalan kelompok yang lebih kuat,

sistem pengelolaan kelompok yang lebih bersih, dan interaksi yang lebih luas antara kelompok dengan kelompok lain dalam masyarakat.

5. Peningkatan kapasitas masyarakat dan distribusi pendapatan diwujudkan dalam peningkatan pendapatan keluarga miskin yang dapat memenuhi kebutuhan dasar dan sosial.

Menurut Ife (2002) yang dikutip oleh Hairi Firmansyah (2012), bahwa program pemberdayaan masyarakat hanya mungkin dapat mewujudkan indikator-indikator keberdayaan bila mana dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan, seperti prinsip holisme, keberlanjutan, keanekaragaman, perkembangan organik, perkembangan yang seimbang, dan mengatasi stuktur yang merugikan. Prinsip-prinsip inilah yang bila diterapkan secara konsekuen akan menjadikan program pemberdayaan tersebut sebagai pemberdayaan masyarakat yang mampu memberdayakan masyarakat. Kajian-kajian konseptual tentang pemberdayaan menyajikan banyak indikator keberdayaan. Empat diantaranya menyangkut derajat keberdayaan (Soeharto, 2008) yaitu:

- a. Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (*power to*)
- b. Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (*power within*)
- c. Tingkat kemampuan menghadapi hambatan (*power over*)
- d. Tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas (*power with*)

UNICEF mengusulkan lima dimensi untuk mengukur tingkat pencapaian pemberdayaan masyarakat, termasuk kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol. Kategori analisis lima dimensi bersifat dinamis, terkait secara sinergis, dan saling melengkapi. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci dari masing-masing dimensi:

1. Kesejahteraan. Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari pemenuhan kebutuhan dasar (seperti sandang, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan).
2. Akses. Dimensi ini melibatkan akses yang sama terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh keberadaan sumber daya. Kurangnya

akses menjadi kendala untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesenjangan dalam dimensi ini disebabkan oleh kenyataan bahwa orang-orang kelas atas tidak dapat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dibandingkan dengan orang-orang yang berada di kelas yang lebih tinggi dibanding mereka yang berasal dari kelas rendah, yang berkuasa dan dikuasai. Sumber daya dapat berupa waktu, tenaga, tanah, kredit, informasi, keterampilan dan lain sebagainya.

3. Kesadaran kritis. Jurang yang muncul dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan alam yang sudah ada sejak zaman dulu, juga bukan murni kehendak Tuhan, melainkan hasil struktural dari diskriminasi yang melembaga. Tingkat keberdayaan masyarakat ini sangat penting dalam bentuk kesadaran masyarakat, yaitu kesenjangan merupakan bentuk sosial yang dapat atau harus diubah.
4. Partisipasi. Tingkat pemberdayaan ini adalah masyarakat dari berbagai lembaga yang terlibat. Artinya masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kepentingan mereka tidak diabaikan.
5. Kontrol. Dalam hal ini, pemberdayaan mengacu pada penguasaan sumber daya yang ada pada semua lapisan masyarakat. Dengan kata lain, bahwa sumber daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat mewujudkan hak nya, tidak hanya segelintir orang yang berhak menikmati sumber daya, tetapi semua lapisan masyarakat. Masyarakat dapat mengontrol dan mengelola sumber daya mereka.

#### 2.1.1.6 Strategi dan Proses Pemberdayaan Masyarakat

Strategi merupakan hal yang sangat penting ketika akan memberikan suatu program pemberdayaan. Strategi yang memberikan perhatian lebih banyak kepada lapisan masyarakat yang masih tertinggal dan hidup di luar jalur kehidupan zaman sekarang atau modern. Strategi ini perlu lebih dikembangkan yang intinya adalah bagaimana rakyat lapisan bawah harus dibantu agar lebih berdaya, sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kemampuan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, tetapi juga sekaligus meningkatkan kemampuan

masyarakat di berbagai aspek untuk menjalani kehidupannya. Strategi pemberdayaan, hakikatnya merupakan gerakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Menurut Suharto (2005, hlm. 66) menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dengan klien dalam settingan pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan dari klien, hal ini bukanlah strategi utama dalam pemberdayaan. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengaitkan klien dengan sumber atau sistem lain. Dalam konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*), yaitu:

1. Aras mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *strees management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas di kehidupannya. Model ini sering disebut pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered aphoach*).
2. Aras mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok. Biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikpa klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Aras makro, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Strategi sistem besar memandang klien

sebagai orang yang sudah memiliki kompetensi untuk memahami situasi mereka sendiri untuk memilih strategi yang tepat.

Strategi pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pemerataan kesempatan yang dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dalam hal persamaan aksesibilitas dan keadilan atau kewajaran, serta tidak membedakan dalam mendapatkan kesempatan yang sama (Priyono 1996, hlm. 73). Sedangkan menurut Hulme dan Turner dalam bukunya bahwa pemberdayaan (Hulme, David & Turner M. 1990, hlm. 130) dapat dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) strategi antara lain:

1. *The welfare approach*, pendekatan ini mengarah pada pendekatan manusia dan bukan untuk memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat tetapi hal tersebut untuk memperkuat keberdayaan/ kemampuan masyarakat dalam pendekatan sentrum of power, yang dilatar belakangi oleh kekuatan potensi lokal masyarakat itu sendiri.
2. *The development approach*, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat.
3. *The empowerment approach*, pendekatan yang melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik, dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan mereka.

Pelaksanaan strategi, proses dan pencapaian sebuah tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto, penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan, lebih jelasnya yaitu sebagai berikut:

1. Pemungkinan, Yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang secara optimal. Jadi pemberdayaan

harus mampu membebaskan sesuatu yang terhambat dari diri masyarakat tersebut.

2. Penguatan, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*) baik pengetahuan ataupun kemampuan. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.
3. Perlindungan, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah (Mulyawan 2016, hlm. 67).
4. Penyokongan, yaitu adanya bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu melakukan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Jadi pada intinya pemberdayaan mampu memberikan dukungan kepada masyarakat agar mereka mampu menjalankan tugasnya dan tidak merasa terpinggirkan.
5. Pemeliharaan, yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan didtribusi sehingga setiap orang memiliki kesempatan berusaha. Istilah pemberdayaan sendiri dipakai untuk menggambarkan seorang individu seperti yang diharapkan. Sehingga dapat disimpulkan setiap aktivitas individu-individu mempunyai

kontrol di semua aspek kehidupan sehari-hari yang bertujuan sebagai bukti keberadaan dan keberdayaannya.

Dengan demikian, aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya. Dibangun dari sumber daya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan kebergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan.

## **2.1.2 Bank Sampah**

### **2.1.3.1 Pengertian Bank Sampah**

Menurut Surwenda, (2012, hlm. 22) “Bank sampah merupakan tempat atau gudang sampah untuk melakukan kegiatan pelayanan kepada penabung sampah yang dilakukan oleh teller bank sampah. Ruangan yang ada di bank sampah dibagi menjadi beberapa ruangan yaitu, ruang untuk menyimpan sampah yang ditabung, sebelum diambil oleh pengepul, sampah untuk diolah dan juga untuk sampah basah atau organik. Bank sampah merupakan tempat untuk menabung sampah yang di pilah menurut jenis sampahnya. Cara bank sampah bekerja untuk nasabah adalah melalui pencatatan, pembukuan dan manajemen pengelolaannya. Jika pada bank sampah umum, yang disetorkan nasabah adalah uang, akan tetapi dalam bank sampah yang disetorkan adalah sampah yang memiliki nilai ekonomis.

Menurut Bambang Wintoko (2013, hlm. 57), bank sampah merupakan tempat teller bank sampah melakukan kegiatan pelayanan kepada para penabung sampah. Bank sampah merupakan nama atau julukan dari kegiatan pengelolaan sampah di masyarakat. “Bank” di sini mengacu pada sistem yang dianut dan diterapkan oleh bank sampah. Misalnya ada direktur, bendahara dan juga teller. Lalu ada nasabah atau anggota bank sampah, proses menabung, pengambilan hasil tabungan, penukaran, penjualan, dan lain sebagainya. Satu-satunya perbedaan mengejutkan yaitu masyarakat

tidak menabung menggunakan uangnya, tetapi menabungkan sampah mereka. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bank sampah adalah tempat untuk “menabung” sampah.

Yang dimaksud “menabung” dalam hal ini yaitu menjual sampah warga atau masyarakat yang masih memiliki nilai ekonomisnya atau biasanya disebut sebagai rosok ke petugas bank sampah. Bedanya dengan menjual rosok ke pembeli rosok yaitu masyarakat yang menjual sampah rosok mereka tidak langsung menjual kepada pengepul rosok keliling, tetapi hasil penjualan sampah warga disimpan di dalam bank tersebut. Selain itu masyarakat tidak harus menunggu sampahnya banyak dahulu, berapapun sampah yang dibawa ke bank sampah akan diterima karena ada pencatatan berat sampah yang nantinya diakumulasikan dengan tabungan sampah sebelumnya. Oleh sebab itulah mengapa disebut menabung sampah, jadi sampah yang ditabung warga dijual oleh pihak bank sampah dan hasil penjualan sampah oleh pihak bank sampah akan dimasukkan di dalam rekening penabung sampah dalam bentuk uang yang dapat diambil setiap satu bulan sekali.

Sampah-sampah yang disetorkan ke bank sampah secara garis besar sampah dibagi dalam dua kelompok, yaitu :

- a) Sampah Organik : segala macam sampah baik dari aktivitas manusia atau bukan dimana limbah tersebut dapat mengalami pembusukan dan terurai. Seperti : sisa makanan, sisa sayuran, dan sampah dedaunan.
- b) Sampah Anorganik : segala macam sampah baik dari aktivitas manusia atau bukan yang tidak dapat mengalami pembusukan dan terurai. Seperti : kaleng, plastik kresek, dan seng.

Dari pengertian-pengertian sebelumnya dapat dipahami bahwa bank sampah merupakan tatanan mengelola sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis dan pengelolaannya itu sangat kreatif berdasarkan bank sampah masing-masing. Dari adanya bank sampah dari segi ekonomi, dapat menjadi tambahan penghasilan. Dan dalam segi kesejahteraan itu bisa

mensejahterakan masyarakat dengan adanya pengolahan/bank sampah tersebut. Karena sampah-sampah baik organik atau anorganik dapat disalurkan dan juga nantinya menghasilkan. Selain menghasilkan uang dengan adanya bank sampah sangat berdampak baik sekali bagi masyarakat. Bank sampah tidak hanya mengubah pola pikir masyarakat tentang kekompakan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sampah dari segi ekonomi, tetapi juga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memperbaiki kehidupan masyarakat diberbagai aspek.

#### 2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Bank Sampah

Tujuan bank sampah adalah untuk memberi manfaat kepada masyarakat berupa wawasan juga hal baru mengenai pengelolaan sampah, agar masyarakat dapat mengetahui betapa pentingnya sampah jika diolah dengan benar. Ada juga hal lain yaitu, dapat membantu para anggota bank sampah dalam memenuhi pokok atau kebutuhan dasar untuk bisa membantu dalam menunjang kehidupannya. Oleh karena itu, manfaat lain yang menarik adalah kedekatan juga rasa peduli untuk mengelola sampah. Keberadaan bank sampah membuat masyarakat sadar akan pentingnya kebersihan, mengurangi penyakit, terjauh dari bencana alam, merubah sampah jadi barang-barang yang berfungsi dan memiliki nilai, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat bisa menunjang kehidupannya.

Bank sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis. Manfaat bank sampah untuk masyarakat adalah dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan sampah mereka akan mendapatkan hasil atau imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki. Masyarakat dapat sewaktu-waktu mengambil uang pada tabungannya saat tabungannya sudah terkumpul banyak. Imbalan yang diberikan kepada penabung tidak hanya berupa uang tetapi ada juga

yang berupa bahan pokok, sekolah gratis dan asuransi kesehatan.(Bambang Wintoko 2013, hlm. 71).

#### 2.1.3.3 Prinsip Bank Sampah

Menurut Yuwono (2006, hlm. 34), ada beberapa prinsip pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat, diantaranya: partisipasi masyarakat, batas daerah yang jelas, cara pengelolaan sampah yang komprehensif, memanfaatkan sampah dengan optimal, fasilitas untuk sampah harus memadai, harus adanya kelompok penggerak, optimalkan pendanaan sendiri, pola kemitraan yang menguntungkan.

Program pengurangan (minimalisasi) sampah dapat dimulai dari sistem pengumpulan, pengangkutan dan sistem pembuangan sampah. Oleh karena itu, program pengelolaan sampah dapat dilakukan pada semua tahapan sistem pengelolaan sampah. Idealnya, pengurangan sampah ini bisa dimulai dari awal, dengan wadah sebagai bagian dari subsistem utama. Hal ini berkaitan langsung dengan peran serta masyarakat sebagai penghasil sampah itu sendiri. Kegiatan ini melibatkan masyarakat, karena masyarakat merupakan penghasil banyak sampah dan sumber dari sampah-sampah tersebut.

#### 2.1.3.4 Pengelolaan Bank Sampah

Sistem pengelolaan sampah terpadu ialah gabungan dari sistem pengelolaan yang terklarifikasi, yaitu sampah organik dan an-organik dibagi menjadi beberapa kelompok dan menempatkannya pada tempat atau wadah yang berbeda, kemudian menerapkan konsep 3R untuk pengolahannya yaitu: *reduce* (mengurangi), *reuse* (gunakan kembali), *recycle* (daur ulang) atau 3M. *Reduce* berarti mengurangi segala sesuatu yang menghasilkan sampah. *Reuse* berarti mengacu pada penggunaan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. *Recycle* mengacu pada pemrosesan ulang (daur ulang) sampah menjadi bahan baku baru atau produk baru yang berguna.

Pengelolaan sampah bank sampah tidak hanya menabung sampah, tetapi juga mencakup upaya agar masyarakat dapat mengurangi dan memanfaatkan sampah yang dihasilkan melalui daur ulang, seperti mengolah sampah organik menjadi pupuk atau memanfaatkannya untuk membudidayakan maggot dan sampah an-organik jadi kerajinan atau produk-produk perlengkapan rumah.

Dalam pengelolaan Bank Sampah Kartini menggunakan atau mengacu pada fungsi manajemen Menurut Nickles dan McHugh (1997), manajemen yang diacu bank sampah ada beberapa yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

- a. Perencanaan ialah kegiatan yang terencana, dilihat dari keinginan untuk dituju atau dicapai, program apa saja yang wajib dilaksanakan, tata caranya, serta penerapan orang-orang yang diperlukan dalam proses menyelenggarakan program agar mencapai sebuah tujuan. Perencanaan berada pada posisi kesatu dari fungsi manajemen juga yang utama diantara fungsi-fungsi lainnya. Proses dalam perencanaan berkaitan dengan upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan pada masa yang akan datang untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Dalam menyusun perencanaan, yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan, definisi dan penjabaran dari visi misi, selanjutnya perencanaan program. Dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan adalah penentuan dari awal hingga akhir. Ada 2 kategori yaitu perencanaan bersumber pada waktu dibagi menjadi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- b. Pengorganisasian merupakan proses pembentukan struktur organisasi yang akan menjalankan tugasnya masing-masing sebagaimana yang telah diatur dalam perencanaan awal. Menurut John Suprihanto (2014), pengorganisasian merupakan suatu kegiatan untuk menjalin ikatan kerja antar anggota dalam kelompok agar dapat bersosialisasi juga adanya kerja sama guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam pengorganisasian ini, ada 2 aspek utama dalam ketentuan penyusunan

struktur organisasi, yaitu meliputi departementasi serta pembagian kerja. Departementasi merupakan pengelompokan kegiatan kerja suatu organisasi tetapi antar kelompok saling membantu kegiatan satu sama lain. Sedangkan pembagian kerja adalah dimana setiap individu dalam organisasi melakukan tugas dan bertanggung jawab atas tugasnya. Dalam suatu organisasi terdapat tugas masing-masing yang menjadi tanggung jawab para anggota tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa harus adanya kerjasama dalam suatu organisasi.

- c. Pelaksanaan (*Actuating*) ialah usaha untuk menciptakan iklim kerja sama diantara para pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara dengan apa yang telah direncanakan dan di tetapkan di awal. Pelaksanaan ini dilakukan hasil dari proses awal yaitu perencanaan. Dimana dalam pelaksanaan ini melakukan apa yang sudah direncanakan agar dapat mencapai tujuan. Dalam proses pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan perlu adanya kerjasama antar anggota atau tim sehingga program terlaksana dengan baik. Pelaksanaan dilakukan dengan semaksimal mungkin oleh anggota agar dapat tercapai segala tujuan yang telah ditentukan.
- d. Pengawasan (*Controlling*) merupakan suatu proses yang dilakukan untuk melihat progress seluruh rangkaian kegiatan atau program yang telah direncanakan, diorganisasikan dan di implementasikan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga apabila dalam setaip program terdapat kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Dalam pelaksanaan pengawasan harus adanya prinsip agar fondasi tetap kuat. Prinsip-prinsipnya yaitu harus bisa mengontrol diri, sesama anggota juga organisasi karena itu akan sangat berpengaruh kedepannya untuk bank sampah itu sendiri. Pengawasan pada bank sampah, perlu adanya pengawasan lebih agar program-program yang berjalan dapat lebih berkembang lagi untuk kedepannya. Hasil dari pengawasan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan bank sampah kedepannya, apa saja yang perlu diperbaiki dan harus ditambah. Pengawasan pada bank

sampah biasanya dilakukan oleh ketua atau direktur juga dibantu oleh pihak yang memelopori yaitu dinas.

### **2.1.3 Kesejahteraan Masyarakat**

#### **2.1.4.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat**

Menurut Badrudin (2012) Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu kondisi yang menunjukkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial yaitu kondisi yang menunjukkan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak serta mampu mengembangkan diri. Untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, yaitu tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk konsumsi pangan dan non-pangan, tingkat pendidikan keluarganya, dan tingkat kesehatan keluarga dalam suatu masyarakat tersebut (BPS Indonesia 2014).

Kesejahteraan masyarakat yaitu titik untuk melihat ukuran suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan dapat diukur dari segi kesehatan manusia, kondisi keuangan, kebahagiaan dan kualitas hidup (Segel dan Bruzy 1998, hlm. 8). Sedangkan, menurut Midgley dalam Suud (2006, hlm. 5), keadaan kesejahteraan berbasis masyarakat terdiri dari tiga komponen: pertama, sebesar apa masalah yang ada dimasyarakat dapat dikendalikan, kedua, seluas apa kebutuhan-kebutuhan dapat dipenuhi dan yang terakhir yaitu setinggi apa kesempatan-kesempatan untuk maju tersedia. Ketiga unsur tersebut berlaku bagi individu, komunitas dan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006, hlm. 22), kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang bisa dilihat dari rumah yang layak, sandang (pakaian) dan pangan (makanan), pendidikan dan kesehatan, juga keadaan seseorang yang

mampu memaksimalkan tingkat batas anggaran tertentu dan juga dimana tercukupinya kebutuhan jasmani rohani masyarakat tersebut.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah kondisi dimana masyarakat dapat merasakan kebahagiaan, keselamatan, kemakmuran dalam hidupnya yang dimana berbagai aspek dalam kehidupannya dapat terpenuhi baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, keterampilan, jiwa sosial dan lain sebagainya. Yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di masa yang akan datang jika kehidupan mereka memiliki kesejahteraan.

#### 2.1.4.2 Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat memiliki tujuan diantaranya adalah :

- a. Agar masyarakat dapat mencapai arti sejahtera dalam hidupnya, sejahtera dalam arti tercapainya segala kebutuhan kehidupan pokok seperti sandang, pangan, papan, rumah yang bersih&nyaman, kesehatan, dan jiwa sosial meningkat.
- b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik dengan masyarakat dilingkungan sekitar, misalnya menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan kualitas taraf hidup yang memuaskan.

#### 2.1.4.3 Tahap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari beberapa tahapan dibawah ini Menurut Ali dalam Widiastusti (2015, hlm. 41-42) yaitu :

- a) Keluarga Pra Sejahtera ialah para keluarga yang belum bisa penuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya secara manual, semacam kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan juga pendidikan dikarenakan beberapa faktor.
- b) Keluarga Sejahtera Tahap I yaitu keluarga yang sudah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal atau bisa di katakan pas-pasan atau pas butuh pas ada, namun masih belum bisa

memenuhi seluruh kebutuhan tambahan lainnya, seperti makan makanan protein baik, pakaian bagus, rumah tidak sempit atau layak, sehat, mempunyai penghasilan tetap, dan mengikuti program keluarga berencana.

- c) Keluarga Sejahtera Tahap II yaitu para keluarga yang bisa dikatakan telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mereka sudah termasuk bisa memenuhi kebutuhan sosio psiko tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan pengembangannya, seperti contohnya menabung, bisa mendapatkan informasi melalui media atau gadget, ikut serta di lingkungan masyarakat.
- d) Keluarga Sejahtera Tahap III yaitu keluarga tahap ini sudah bisa penuhi segala kebutuhan keseluruhan, namun belum bisa berbagi atau berkontribusi secara optimal kepada masyarakat.
- e) Keluarga Sejahtera Tahap III Plus yaitu keluarga-keluarga yang sudah bisa penuhi segala kebutuhan dalam menunjang kehidupannya dan juga sudah bisa memberikan sumbangan nyata pada masyarakat secara berkelanjutan.

#### 2.1.4.4 Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan rata-rata dapat diukur dengan melihat berbagai aspek yang ada pada kehidupan, yaitu:

- a) Mutu yang dilihat dari sudut materil, semacam bagaimana kondisi atau keadaan rumah, cara berpakaian, bersosialisasi atau pergaulan, dan lain sebagainya.
- b) Mutu hidup yang dilihat dari segi fisik, semacam jasmani dan rohani kita, lingkungan alam di daerah tempat tinggal, dan lain sebagainya.
- c) Mutu hidup yang dilihat dari segi mental, seperti kualitas lingkungan, pendidikan, budaya dan sebagainya.
- d) Mutu hidup dari segi spiritual, semacam moral, agama, etika, dan sebagainya (Rosni 2017, hlm. 58).

Sedangkan Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan sosial bisa diukur dari 8 indikator ialah sebagai berikut:

- a) Kependudukan, dalam kependudukan itu meliputi jumlah serta bagaimana laju perkembangan penduduk serta kepadatan penduduk.
- b) Kesehatan, meliputi seberapa besar angka dan juga status kesehatan masyarakatnya.
- c) Pendidikan, meliputi kemampuan dalam membaca, menulis, dan berhitung itu termasuk dalam hal inti atau dasae dalam tingkat pendidikan.
- d) Ketenagakerjaan, meliputi peluang kerja, terdapat lapangan pekerjaan serta status pekerjaan.
- e) Taraf dan pola konsumsi, meliputi pemasukan dan pengeluaran dalam rumah tangga.
- f) Perumahan dan lingkungan, meliputi kualitas rumah tinggal yang di tempati oleh masyarakat, bagaimana keadaan atau fasilitas yang digunakan dan juga kebersihan lingkungan.
- g) Kemiskinan bisa dilihat berdasarkan tingkat tinggi atau rendahnya kemiskinan di suatu daerah atau tempat.
- h) Sosial dalam hal ini seperti melakukan ekspedisi ke tempat-tempat wisata, menambahkan kredit untuk usaha yang akan membuat masyarakat menjadi antusias, melakukan aktivitas sosial maupun budaya, terakhir menggunakan akses teknologi komunikasi yang canggih.

## **2.2 Hasil Penelitian yang Relevan**

1. Dalam skripsi Pitri Nurhidayah (Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 2017) Universitas Negeri Yogyakarta, yang berjudul "*Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah di Dusun Serut, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul*". Pitri Nurhidayah mengungkapkan bahwa latar

belakang dari penelitiannya ialah karena ia tertarik pada pembahasan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah di Dusun Serut, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Jenis penelitian yang digunakannya yaitu pendekatan kualitatif serta metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Dari pendekatan ini berharap peneliti bisa menghasilkan data yang deskriptif guna mengungkap proses terjadinya. Hasil dari penelitian tersebut dapat mengembangkan potensi masyarakat dalam berbagai aspek untuk menunjang kehidupannya. Perbedaan penelitian saya dan penelitian ia adalah penelitian yang dilakukannya lebih berfokus pada Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah di Dusun Serut, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Koperasi Bank Sampah Kartini dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Pada penelitian saya ini berfokus untuk memberdayakan masyarakat melalui program koperasi bank sampah yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat menjadi lebih berdaya dan akan lebih memperbaiki kehidupan masyarakat menjadi lebih baik aman, tentram, bersih, dalam berbagai segi akan lebih baik lagi.

2. Dalam skripsi Jean Anggraeni (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, 2013) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta “*Dampak Bank Sampah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Lingkungan (Studi Kasus Bank Sampah Cempaka II di Kelurahan Pondok Petir RW 09 Bojongsari Kota Depok)*”.

Jean Anggraini mengungkapkan bahwa latar belakang penelitiannya ialah keingintahuannya terhadap Dampak Bank Sampah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Lingkungan (Studi Kasus di Bank Sampah Cempaka II di Kelurahan Pondok Petir RW 09 Bojongsari

Kota Depok). Jenis penelitian yang digunakannya yaitu penelitian melalui pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian tersebut yaitu dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pengelolaan sampah yang nantinya membuat lingkungan menjadi bersih, juga sampah yang dikelola akan menghasilkan. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ia yaitu penelitian yang di lakukannya berfokus pada Dampak Bank Sampah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Lingkungan (Studi Kasus Bank Sampah Cempaka II di Kelurahan Pondok Petir RW 09 Bojongsari Kota Depok)". Sedangkan penelitian saya lebih berfokus pada Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Koperasi Bank Sampah Kartini dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Bank Sampah Kartini Desa ImbanagaraRaya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis).

3. Dalam skripsi Shofiyatul Muntaza yang berjudul *"Pengelolaan Program Bank Sampah sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Bank Sampah Bintang Mangrove Kelurahan Gunung Anyar, Surabaya"* pada tahun 2015. Shofiyatul mengungkapkan bahwa pengelolaan program bank sampah bintang mangrove sudah dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan fungsi manajemen yang ada. Perbedaan penelitian Shofiatul dengan saya yaitu ia mengenai pengelolaan program bank sampah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian saya berfokus pada Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Koperasi Bank Sampah Kartini dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Bank Sampah Kartini Desa ImbanagaraRaya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis). Dimana dalam penelitian saya ini lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program bank sampah kartini yang nantinya akan membuat masyarakat lebih sejahtera. Bisa dikatakan sejahtera karena dari program-program yang ada sangat berdampak atau menghasilkan hasil yang positif bagi masyarakat.

4. Dalam skripsi Mita Novianti yang berjudul "*Dampak Program Bank Sampah terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai, Kota Medan*" pada tahun 2013. Hasil dari penelitian Mita tersebut yaitu pada program bank sampah berdampak pada social ekonomi masyarakat yang dilihat dari meningkatnya pendapatan di lingkungan masyarakatnya juga lingkungan menjadi semakin bersih serta interaksi sosial di daerah tersebut menjadi lebih bagus. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mita Novianty yaitu membahas mengenai dampak program bank sampah terhadap social ekonomi masyarakat dengan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian saya lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui program koperasi bank sampah kartini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Jika penelitian yang dilakukan oleh Mita lebih berfokus pada sosial ekonomi masyarakat, penelitian saya lebih berfokus pada pencapaian agar bagaimana masyarakat bisa menjadi lebih berdaya juga menjadi lebih sejahtera. Karena kesejahteraan dalam hidup itu layak di dapatkan oleh setiap orang dalam menjalani kehidupannya di dunia ini.
5. Dalam skripsi Azelia Deskasari yang berjudul "*Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah Bangkitku Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru Kota Jambi*" pada tahun 2019. Hasil dari penelitian Azelia tersebut yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat yang di lakukan di Bank Sampah Bangkitku yaitu dilakukan dengan melalui program menabung. Dengan adanya bank sampah bangkitku sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat sangat memberikan manfaat berupa tambahan penghasilan bagi keluarga. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Azelian Deskasari yaitu tentang pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah bangkitku dengan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian Azelian ini lebih terfokus bagaimana memberdayakan masyarakat dengan melalui bank sampah

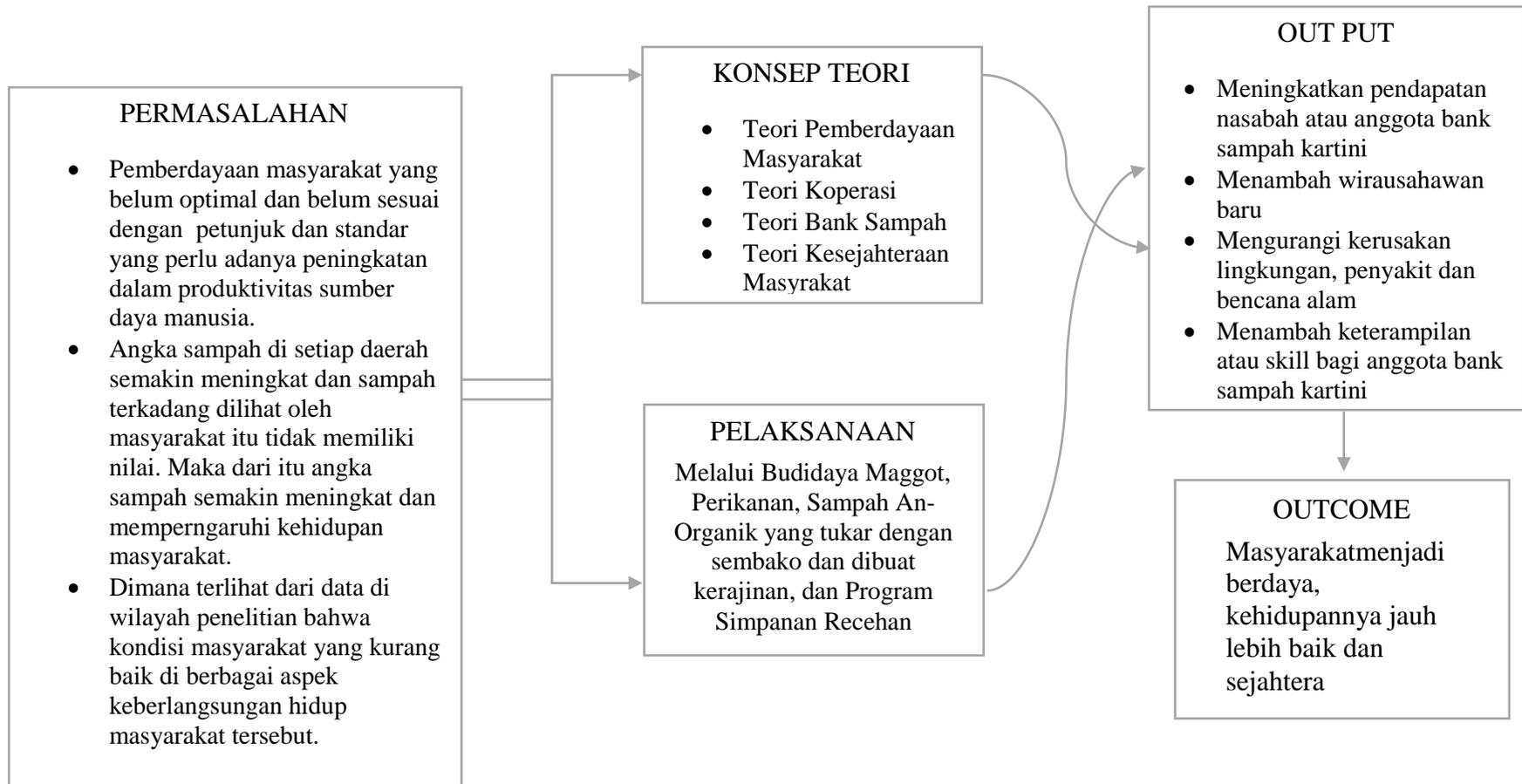
yaitu memanfaatkan sampah-sampah bekas. Sedangkan penelitian saya lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui program koperasi bank sampah kartini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Dimana penelitian saya ini berbeda karena adanya koperasi di dalam bank sampah yang mana koperasi ini tidak hanya berkaitan dengan sampah tetapi dengan hal-hal lainnya yang nantinya akan bermanfaat bagi anggota bank sampah.

### **2.3 Kerangka Konseptual**

Masyarakat pada saat ini sangat membutuhkan hal yang dapat bisa menjadikan mereka lebih mandiri dan bisa mengatasi permasalahan yang ada pada kehidupannya. Seperti banyaknya permasalahan yang muncul seiring berjalannya waktu, karena semakin berkembangnya negara ini ke arah yang lebih modern. Hal ini mempengaruhi kehidupan masyarakat, mereka harus bisa menyesuaikan agar tidak tertinggal. Masyarakat harus bisa lebih mengembangkan potensi yang mereka miliki, yang sebelumnya tidak memiliki keterampilan harus adanya keinginan untuk berubah. Dalam hal ini pemberdayaan memiliki arti penting yaitu terciptanya kemandirian, agar masyarakat mampu berbuat, memahami serta dapat mengaplikasikan dalam berbagai hal yang nantinya akan menghasilkan di berbagai aspek. Dengan melakukan pemberdayaan yang bisa dilakukan melalui berbagai cara akan menjadikan segala hal bermanfaat atau berguna. Apapun bisa dilakukan dengan pemberdayaan hal yang dianggap tidak berguna atau tidak memiliki nilai, jika masyarakat lebih bisa tidak memandang sebelah mata maka hal itu bisa dijadikan hal-hal yang akan sangat luar biasa, semisal yaitu sampah.

Sampah jika dikelola dengan baik dan benar akan menghasilkan dan bernilai ekonomis. Hasil dari pengelolaan sampah bisa menghasilkan

dan membantu masyarakat memperbaiki atau melengkapi aspek dalam kehidupannya. Dalam segi kesehatan contohnya lingkungan menjadi bersih, rapih, nyaman, aman, terbebas dari penyakit, bencana alam seperti banjir, longsor dan lain sebagainya. Dalam segi ekonomi terbantu dari hasil sampah tersebut bisa menghasilkan uang. Dari contoh tersebut bisa dikatakan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Kesejahteraan masyarakat yaitu titik untuk melihat ukuran suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan dapat diukur dari segi kesehatan manusia, kondisi keuangan, kebahagiaan dan kualitas hidup (Segel dan Bruzy 1998, hlm. 8).



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## **2.4 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah kartini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa ImbanagaraRaya, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana hasil pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah kartini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa ImbanagaraRaya, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis?